

PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

Ilham Agung Ashariadi
NPP. 28.0541
Asdaf Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Politik Pemerintahan

Email : ilhamagungashariadi21@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (GAP): The reaserch focus to know how the role of the National Unity and Politics Agency in carrying politic education based on the problem of low curiosity, awareness citizen about politic and the lack of citizen participation about politic activity. **Purpose:** This research aims to know whether the role of the National Unity and Politics Agency has run well or not and to analyse the inhibiting factors in carrying of political education also to know what is the efforts to overcome these inhibitors. **Method:** The method which used in this research is descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection technique which is used by researcher are Observation, Interview, and Documentation. **Result:** The reaserch shows that role of the National Unity and Politics Agency in carrying politic education is not yet maximal. There are any obstacles in carrying process. **Coclusion:** Based on the research that carrying politic education is not yet maximal. There are any obstacles in carrying process, first is strategic plan arrangement which is shackle, budget constraints, the methods which is used, not having a syllabus, also the quality of society human resources. Meanwhile the National Unity and Politics Agency has effort to overcome these obstacles for optimalizing carrying politic education.

Keywords : National Unity and Politics Agency, Role, Politic Education.

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penelitian berfokus pada bagaimana peranan badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik berdasarkan permasalahan yang ada yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan politik, kurangnya partisipasi yang baik dari masyarakat terkait kegiatan politik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah berjalan dengan baik atau belum dan menganalisis faktor penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan politik serta mengetahui upaya untuk mengatai hambatan tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ialah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Peneliti menunjukkan bahwa peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik belum maksimal, terdapat hambatan dalam proses penyelenggaraannya. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil

penelitian, pendidikan politik yang diselenggarakan belum maksimal dikarenakan penyusunan renstra yang membelenggu, keterbatasan anggaran, metode yang dilakukan, tidak memiliki silabus, serta kualitas dari SDM masyarakat. Namun badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memiliki upaya guna mengatasi hambatan tersebut untuk memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan politik tersebut.

Kata Kunci : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Peran, Pendidikan Politik.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menunjukkan bahwa Pemilu ialah suatu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil dalam Negara Kesatuan Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diberikan otonomi berlandaskan prinsip negara kesatuan untuk dapat mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah dilakukan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat lokal, memberikan peluang pendidikan politik untuk berdemokrasi di daerah. Masyarakat dituntut untuk memiliki sikap aktif dalam berpartisipasi pada jalannya pemerintahan di daerah melalui demokrasi yang telah diatur dan sesuai dengan prosedur yang ada. Pemerintah memiliki peran tersendiri untuk memberikan pendidikan politik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pendidikan politik ialah suatu proses pemahaman dan pembelajaran tentang kewajiban, hak, serta tanggung jawab oleh seluruh warga negara untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Terselenggaranya pendidikan politik dengan baik secara optimal dapat meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat menjalankan kewajiban dan haknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Latar belakang dalam penelitian ini adalah indeks demokrasi masyarakat Kabupaten Cirebon yang tergolong rendah, bahkan berada pada posisi dua terbawah antar kota dan kabupaten se provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil presentasi tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019.

1.2 Permasalahan

Ada beberapa permasalahan terkait dengan bagaimana peranan badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik di Kabupaten Cirebon. Pendidikan politik memiliki pengaruh terhadap kemajuan daerah dan masyarakat itu sendiri. Di beberapa daerah masyarakat Kabupaten Cirebon masih banyak merasa tidak peduli akan pendidikan politik. Masyarakat merasa pendidikan politik hanya untuk mereka yang terjun dalam dunia politik. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam berpolitik, dikarenakan kurangnya

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri, selain itu tingkat pemahaman akan pendidikan politik yang dimiliki masyarakat pun masih tergolong rendah.

Salah satu indikator rendahnya demokrasi masyarakat di Kabupaten Cirebon yakni dapat dilihat pada, hasil tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Presiden dan Wakil Preseiden terkahir, yaitu pada tahun 2019. Yakni Kota Cimahi memiliki presentase partisipasi masyarakat yang sangat tinggi yaitu 85,94%. Sedangkan Kabupaten Indramayu memiliki presentase partisipasi masyarakat yang paling rendah dibandingkan kota/kabupaten yang lain yaitu hanya mencapai 72,02%, setelah itu disusul Kabupaten Cirebon dengan presentase partisipasi masyarakatnya hanya sebesar 74,34% saja. Tabel tersebut menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Kabupaten Cirebon terutama pada tingkat partisipasi masyarakat berada pada urutan 2 terendah antara Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon yaitu bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri sejauh ini hanya sebagai kegiatan rutinitas yang harus dilaksanakan tiap tahunnya. Belum memiliki silabus yang tetap. Hal ini disebabkan kewenangan dan anggaran pun terbatas. Pada tahun 2018 merupakan masa transisi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan politik. Hal ini mempengaruhi kapasitas lembaga tersebut, menurut Bapak Agis Waisada Ekaprasti, SE, MM selaku Kasubbid Politik Dalam Negeri. Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon. Pendidikan politik yang sejauh ini dilaksanakan hanya secara klasikal dan kurang menarik terutama untuk pemilih pemula, perlu dilakukan pembaharuan metodologi pendidikan politik. Sumber Bapak Iwan Riwdan Hardiawan, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian sebelum nya, bak dalam konteks peranan suatu badan maupun dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat. Peneilitian Rahmawani berjudul Peran Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Aceh dalam Mensosialisasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Aceh, (Maharani 2017). Menyatakan bahwa Badan Kesbangpol Aceh memiliki peran PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah seminar atau diskusi, melalui media massa, talkshow, spanduk. Terdapat 3 Gerakan sosialisasi revolusi mental yakni Gerakan Indonesia tertib, Gerakan Indonesia melayani, Gerakan Indoneisa bersih. Kegiatan sosialisasi sudah berjalan dengan baik karena kerjasama yang sangat baik dengan pihak pihak terkait, hanya saja dana yang minim membuat gerak sosialisasi terbatas.

Penelitian Anjani berjudul Proses Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Politik Tahun 2017 Oleh Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Dan Pendidikan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Barat, (Anjani, 2018). Mengemukakan bahwa Kegiatan pendidikan politik merupakan kegiatan rutin tahunan. Proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat terdiri dari 4 jenis, yaitu Standar Operating Procedures (SOP) sebagai penyiapan penyelenggaraan, proses pra penyelenggaraan, proses penyelenggaraan, dan proses evaluasi penyelenggaraan. Faktor pendukung dalam proses

penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik ini adalah kerjasama yang baik dengan partai politik, kelengkapan data, mudahnya perizinan, dan partisipasi masyarakat yang baik. Faktor penghambat yaitu kurangnya pendanaan, minimnya tempat pelaksanaan, serta etos kerja pegawai yang rendah.

Penelitian Kesnedy berjudul Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolimas) dalam Pendidikan Politik di Kabupaten Kuantan Singingi, (Kesnedy, 2013). Penelitian Kesnedy ini mengambil latar belakang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 11 April 2011, dimana terjadi kerusuhan dalam pilkada tersebut. Salah satu penyebab terjadinya kerusuhan pilkada tersebut diantaranya adalah kegagalan pemerintah daerah dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dijadikan obyek politik oleh golongan tertentu atau elit partai saja. Hal ini kemudian yang berujung terhadap terjadinya konflik kepentingan, dan kerusuhan kerap kali terjadi menjelang, saat dan pasca pemilukada. Bentuk pendidikan politik yang dilakukan merupakan Sosialisasi, Diskusi, Pembekalan Parpol, Sosialisasi UU tentang prapol, Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol, Pemantauan Keberadaan LSM, Ormas dan Yayasan, Pembinaan LSM, Ormas dan Yayasan, dan Peningkatan Kinerja Pimpinan Parpol. Kendala nya kualitas SDM, Anggaran dan ASN Kesbangpol itu sendiri.

Penelitian Hidayati berjudul Pendidikan Politik Bagi Perempuan Oleh Kesbangpol Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Di Kabupaten Kebumen, (Hidayati,2019). Kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya kaum perempuan yang telah dilaksanakan oleh Kesbangpol merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berpolitik terhadap kaum perempuan sehingga nantinya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kebumen bisa mencapai 30%. Kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi perempuan di Kabupaten Kebumen adalah kendala kurangnya jumlah pegawai di Kesbangpol, dana untuk pelaksanaan kegiatan, dan kendala waktu kehadiran kaum perempuan khususnya yang duduk di partai.

Penelitian Suharno dan Rahman berjudul Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa, (Suharno & Rahman 2019). Penelitian ini tentang pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn untuk meningkatkan kesadaran politik siswa di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta. Pendidikan politik dilaksanakan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi pendidikan politik dikembangkan dari materi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, budaya demokrasi, dan sistem pemerintahan Indonesia. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pendidikan politik ada tiga, yaitu: fasilitas sekolah, organisasi siswa intra sekolah, dan ekstrakurikuler. Faktor penghambat pendidikan politik ada tiga yaitu: kurangnya fasilitas sekolah; minimnya sosialisasi politik dari instansi terkait; dan minimnya contoh keteladanan elit politik nasional.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Peranan Suatu Badan Pemerintah dalam menjalankan

salah satu tugas pokok dan fungsinya, yakni peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik, menggunakan indicator yang berbeda juga dari penelitian – penelitian sebelumnya, yakni menggunakan pendapat Soerjono Soekanto (2007:212-213) mengatakan peran adalah “proses kedudukan (status) yang dinamis dimana suatu individu melaksanakan kewajiban dan haknya berdasarkan kedudukannya yang sesuai, dia menjalankan suatu peranan”. Peranan dengan kedudukan tidak bisa dipisahkan sebab saling ketergantungan satu sama lain. Hal itu menjelaskan bahwa perbuatannya bagi masyarakat beserta kesempatan yang masyarakat berikan merupakan hasil dari peranan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon telah menjalankan perannya dengan baik atau tidak, dalam menyelenggarakan pendidikan politik.

II. METODE

Metode penelitian ialah cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan peruntukkan dan tujuan tertentu. Metode penelitian dilakukan dengan cara ilmiah, berarti penelitian tersebut dilakukan secara Sistematis, Rasional dan Empiris. Data yang akan diperoleh berdasarkan penelitian ini merupakan data yang valid. Penelitian tentunya mempunyai tujuan yang bersifat pengembangan, pembuktian, penemuan, dan memiliki kegunaan bagi khalayak umum maupun pihak terkait dalam penelitian tersebut. Sugiyono (2017 : 2-3)

Berlandaskan judul penelitian, yaitu Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik di Kabupaten Cirebon merupakan bentuk judul kualitatif. Peneliti akan menerapkan metode penelitian kualitatif. Hal tersebut akan mempermudah dalam mengumpulkan data dan informasi nyata sesuai dilapangan yang nantinya akan diuraikan satu sama lain dalam penelitian laporan akhir ini. Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif.

Salah satu tujuan pada penelitian yaitu mengumpulkan suatu data, dibutuhkan teknik dalam pengumpulan data yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi adalah teknik yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai teknik untuk pengumpulan data guna mendukung proses penelitian berjalan dengan baik. Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu teknik analisis data Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2017 : 246-252) :

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

3) *Conclusion Drawing/* Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pernanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a). Peraturan (norma)

1. Cara (Usage)

Berlandaskan informasi dan hasil pengamatan peneliti melalui data - data dan dokumen yang ada. Badan Kesatuan Bangsa dan Poltitk Kabupaten Cirebon telah menyelenggarakan pendidikan politik sebagaimana yang telah dirumuskan yaitu melakukan sosialisasi dan diskusi – diskusi politik dengan metode tatap muka dimana pemateri memberikan paparan kepada peserta yang hadir. Dengan metode seperti ini tidak bisa mendapatkan *feedback* yang maksimal karena peserta akan cepat jenuh seolah – olah hanya sedang mendengarkan guru yang menyampaikan materi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon berupaya untuk mengubah metode tersebut agar lebih menarik perhatian masyarakat dan membuat masyarakat lebih antusias. Sehingga mendapatkan *feedback* yang lebih maksimal, materi yang nantinya akan disampaikan dapat diterima oleh peserta, dan kegiatan pendidikan politik dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

2.) Kebiasaan (*Folkways*)

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari hasil pengamatan peneliti melalui data – data yang ada dan dokumen – dokumen pendukung. Berikut ini beberapa kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon seperti :

- a) Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat (sosialisasi perundangan bidang politik)
- b) Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik
- c) Koordinasi forum-forum diskusi politik

Berdasarkan pengamatan peneliti melauli data – data atau dokumen laporan kegiatan yang ada. Kegiatan pendidikan politik seharusnya dilakukan setiap bulan satu kali disetiap tahunnya, namun karena menyesuaikan anggaran yang tersedia, mengakibatkan kuantitas dan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut tidak menentu dan tidak merata pada setiap bulan dan tahunnya.

3. Tata Kelakuan (*Mores*)

Dalam menyelenggarakan dan fasilitasi pendidikan politik di daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Aturan ini yang memberikan arahan serta fasilitasi proses pendidikan politik. Berdasarkan peraturan tersebut, daerah mempunyai kewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi dan untuk mewujudkannya diperlukan pendidikan politik.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melalui data – data dan dokumen pendukung. Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon sejauh ini yakni sebatas kegiatan Penyuluhan (sosialisasi), Forum diskusi politik, sebagaimana metode tatap muka lainnya. Apabila Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Kegiatan pendidikan politik perlu ditingkatkan untuk mencapai acuan tersebut.

4. Adat – Istiadat (*Custom*)

Output dari peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan pendidikan politik tujuan utamanya adalah mencerdaskan masyarakat yakni melek politik, meningkatnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang demokratis dan partisipatif. dapat dilihat melalui presentase tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Umum 2019 yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden antara kabupaten / kota di Jawa Barat, Kabupaten Cirebon berada pada posisi dua terendah presentase tingkat partisipasi masyarakatnya setelah Kabupaten Indramayu. Kabupaten Cirebon hanya mencapai 74,34% saja selisih 11,60% dengan peringkat pertama yaitu Kota Cimahi sebesar 85,94%. Maka dari itu kegiatan Pendidikan Politik perlu dioptimalkan lagi guna mencapai output tersebut.

b). Organisasi

1) Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat

Bentuk dari kegiatan penyuluhan ini adalah sosialisasi perundang – undangan pada bidang politik. Kegiatan penyuluhan ini diselenggarakan di gedung – gedung Lembaga Pendidikan atau Convention Hall yang sebelumnya telah disewa oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk lokasi dapat menyesuaikan dengan lokasi ter-strategis dari sasaran peserta kegiatan tersebut.

Berikut merupakan beberapa sasaran peserta dari Kegiatan Penyuluhan tersebut :

- Unsur – unsur masyarakat di wilayah sekitar
- Pelajar / Mahasiswa
- Badan Permusyawaratann Desa, Perangkat Desa dan Aparatur Pemerintah
- Pengurus Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Organisasi wanita

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dari Kasubbid Politik Dalam Negeri bapak Agis Waisada Ekaprasti SE., MM. “Kegiatan ini seharusnya dapat direncanakan untuk dilakukan satu bulan sekali secara kontinyu”. Hasil pengamatan peneliti berdasarkan dokumen yang ada pada tahun

2019 kegiatan tersebut hanya bisa dilakukan sebanyak 6 (enam) kali. Diperlukan adanya perbaikan metode dari pelaksanaan kegiatan tersebut agar bisa menarik perhatian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut tentunya dapat menggambarkan bahwa *outcome* yang diharapkan yang telah tercantum sebelumnya sesuai dengan renstra diatas belum tercapai secara maksimal.

2) Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik

Terkait dengan kegiatan mediasi fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik. Badan Kesatuan Bangsa dan politik mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah. Bagaimana Badan Kesbangpol untuk mengantisipasi terjadinya konflik – konflik terutama pada saat pelaksanaan Pemilu yang biasa memicu timbulnya perselisihan.

Peserta dalam kegiatan ini adalah :

- Unsur – unsur masyarakat di wilayah sekitar
- Badan Permusyawaratan Desa setempat, Perangkat Desa dan Aparatur Pemerintah
- Pengurus Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam kegiatan mediasi fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik. Pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sifatnya hanya menawarkan kepada partai politik untuk me mediasi jika terdapat suatu permasalahan dalam suatu partai politik. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga mengacu pada Undang – Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakai sebagai acuan dalam pelaksanaan mediasi.

Namun berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri yakni Bapak Agis Waisada Ekaprasti SE., MM. “ Kegiatan Mediasi ini sebenarnya belum pernah dilakukan karena sifatnya kami hanya menawarkan kepada suatu partai politik bila terdapat permasalahan, kami siap me mediasi nya, namun sejauh ini partai politik tidak mau karena mereka menganggap permasalahan itu adalah urusan internal”.

3) Koordinasi forum – forum diskusi politik

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan melalui data – data dan dokumen – dokumen serta laporan kegiatan tersebut. Bentuk dari kegiatan Koordinasi forum – forum diskusi politik adalah Kegiatan Talkshow yang bertemakan pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan di gedung – gedung atau aula *meeting room* yang telah disewa sebelumnya. Kegiatan ini sama dengan kegiatan sebelumnya yaitu direncanakan untuk dilaksanakan setiap bulan minimal sekali dalam setahun, namun harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta ptioritas kebutuhan dilapangan, sehingga pada tahu 2019 hanya dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.

peserta kegiatan tersebut :

- Unsur – unsur masyarakat di wilayah sekitar
- Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Aparatur Pemerintah
- Pengurus Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan melalui data – data dan dokumen – dokumen serta laporan kegiatan tersebut. Teknis dalam pelaksanaan kegiatan Forum – Forum Diskusi Politik ini yaitu bertemakan Talkshow dengan mendatangkan narasumber sebagai pemateri, pemaparan materi kepada peserta sesuai dengan tema kegiatan tersebut, contoh tema yang pernah dilakukan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kegiatan ini belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal, disebabkan dari kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan tersebut, juga dapat disebabkan oleh materi dan metode yang kurang menarik. Saat peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat umum, masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memahami mengenai teknis Pemilihan Umum terutama pelajar yang hanya mendapatkan informasi tersebut biasanya melalui pendidikan di sekolahnya masing – masing. Hal ini menggambarkan outcome yang dicapai perlu dimaksimalkan kembali agar dapat mencapai sesuai yang diharapkan.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sejauh ini berfokus pada metode tatap muka dengan cara pemberian materi dari narasumber kepada peserta, materi yang diberikan menyesuaikan dengan tema dan para peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan politik tersebut. Kegiatan pendidikan politik ini merupakan sebagai kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Sehingga waktu penyelenggaraanya dilakukan secara fleksibel karena terbatasnya anggaran.

c. Struktur Sosial Masyarakat

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada seorang masyarakat yakni bapak Sanusi sebagai tukang ojek pada tanggal 18 Januari 2021 di Jl. Sunan Drajat No 20 berpendapat bahwa :“Kegiatan-kegiatan politik ya sama sekali nggak ngerti bagi kalangan saya, gak ngerti, saya bukan orang partai,kalo urusan nyoblos saya sih asal milih aja karena gak tau sih siapa yang mau dipilih, yang penting orangnya jujur dan bermasyarakat”.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada seorang masyarakat yakni ibu Nani sebagai pedagang buah pada tanggal 18 Januari 2021 di Jl. Raden Dewi Sartika di depan Surya Toserba mengatakan: “Saya tidak begitu paham apa itu politik, kegiatan yang terbaru politik, Pemilu terkakhir saja saya tidak ikut karena sedang merantau ke luar daerah, saya sendiri sampe saat ini juga belum merasakan manfaat dari pemilihan – pemilihan seperti itu, saya belum pernah dapat bantuan – bantuan dari pemerintah, inginnya sih memilih pemimpin yang adil untuk masyarakatnya. “

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada seorang pedagang buah tersebut. Peneliti mendapatkan informasi bahwa pendidikan politik terutama bagi masyarakat yang awam seperti para pedagang ataupun masyarakat yang berprofesi lain yang tidak berkaitan secara langsung

dengan kegiatan politik sangat lah penting, agar tidak terjadi lagi hal seperti diatas, dimana ibu Nani terpaksa tidak bisa menggunakan hak suara nya karena sedang merantau di daerah lain. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahan terkait administrasi dalam penggunaan hak suara. Selain itu diperlukan edukasi dalam memilih seorang calon pemimpin di daerah nya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat sebagai pemilih pemula Mantan ketua OSIS SMAN 1 Sumber Aden Fahri Rimawan kelas XII IPA 2 pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 berpendapat bahwa :”Selama saya sekolah di SMA, saya belum pernah ikut sosialisasi atau seminar yang temanya politik dari pemerintah, di sekolah biasanya dari BNN,Kepolisian. Menurut saya sosialisasi terkait politik sangat penting untuk kita sebagai pemilih pemula, selama ini kita mendapatkan informasi atau edukasi politik hanya melalui sekolah, kegiata pemilihan ketua OSIS, Mata pelajaran PKN, dan melalui sosial media serta keluarga. “

Berdasarkan informasi – informasi hasil wawancara tersebut. Peneliti dapat mengetahui bahwa masih adanya yang tidak peduli acuh tak acuh terkait politik, bahkan masih ada yang hanya mengugurkan kewajiban saja di pemilu. Pendidikan politik yang diselenggarakan belum merata keseluruh kalangan masyarakat salah satunya yaitu pesantren yang ada di Kabupaten Cirebon. Aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terutama pada bidang Politik Dalam Negeri telah berupaya bersama – sama agar kegiatan pendidikan politik dapat berjalan dengan baik namun tentunya hal tersebut akan lebih maksimal jika faktor – faktor penghambat sebagai berikut dapat diatasi.

3.2 Faktor Penghambat

a. Hambatan Teknis

Terdapat beberapa hambatan yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon masih kurang nya kuantitas dari pegawai dan kualitas dari SDM yang perlu ditingkatkan. Peralihan Struktur kelembagaan dari Kantor menjadi suatu Badan tentunya akan mempengaruhi kewenangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri, maka dari itu perlu nya peningkatan SDM dan kuantitas dari pegawai.

b. Hambatan Non Teknis

1. Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra yang membelenggu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengembangkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan politik secara maksimal dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kegiatan yang berkaitan pendidikan politik belum termasuk kegiatan yang menjadi perhatian utama bagi pemerintahan daerah, sehingga kegiatan pendidikan politik hanya sebatas rutinitas ataupun menyesuaikan dengan kegiatan – kegiatan yang lebih utama lainnya.

2. Keterbatasan Anggaran

Program - program prioritas hinggasaat ini belum berpihak kepada kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan politik. Hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pendidikan politik karena kegiatan pendidikan politik akan dilaksanakan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

3. Silabus

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon belum memiliki silabus atau jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang teratur (permanen) baik waktu maupun materi yang akan diberikan. Selain itu belum bisa menentukan pola pendidikan politik yang sesuai secara objektif untuk diberikan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Metode pelaksanaan yang monoton, diperlukan inovasi untuk menarik perhatian masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan selama ini hanya sebatas kebiasaan – kebiasaan yang sudah berjalan.

4. Kualitas SDM

Salah satu faktor utama dari penentuan kualitas SDM adalah bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu dari kebutuhan dasar untuk setiap manusia, dengan berpendidikan dapat menciptakan manusia yang berkualitas, memiliki intelektual yang baik dan terhindar dari kebodohan. Melalui pendidikan dapat meningkatkan keterampilan seseorang. Kualitas dari pendidikan ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Tamat SD / Sederajat merupakan mayoritas di Kabupaten Cirebon. Tingkat pendidikan masyarakat tentunya akan berpengaruh pada intelektual dan keterampilan seseorang.

3.3 Upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Merumuskan Renstra dengan mengutamakan proses penyelenggaraan pendidikan politik yaitu penyempurnaan kegiatan – kegiatan yang di dalamnya berkaitan dengan pendidikan politik. Bertujuan supaya kegiatan – kegiatan proses penyelenggaraan pendidikan politik dapat berjalan lebih maksimal, efektif dan efisien dibandingkan sebelumnya, guna meningkatkan kuantitas dari segi penyelenggaraan kegiatan. Dengan menjadikan kegiatan pendidikan politik sebagai kegiatan prioritas, secara tidak langsung anggaran yang didapatkan akan meningkat.
2. Meningkatkan suplai keuangan kepada partai politik dalam bentuk Bantuan keuangan partai politik, dengan catatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara lebih ketat pada presentase dana yang terfokuskan untuk kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat, lebih besar dan lebih efektif dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh partai politik itu.
3. Bersama – sama dengan Sub Bidang Politik Dalam Negeri untuk merumuskan silabus pelaksanaan kegiatan pendidikan politik agar pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih terarah baik dari segi materi ataupun kuantitas. Memperbaharui metode dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang lebih inovatif serta cocok bagi seluruh kalangan masyarakat baik dari tingkat pendidikan maupun ekonomi masyarakat tersebut. Sehingga dapat menarik antusiasme dari masyarakat.
4. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang lebih berkompeten, baik dari penyelenggaranya yaitu Aparatur Sipil Negara dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun dari para narasumber dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik tersebut. Guna meningkatkan kualitas dari pelaksanaan pendidikan politik.

3. 5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dianalisa bahwa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupetn Ciebom dalam melaksanakan pendidikan politik melalui tiga kegiatan yakni. Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat (sosialisasi perundangan bidang politik), Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik, dan yang terkahir adalah Koordinasi forum-forum diskusi politik layaknya dengan temuan Penelitian (Kesnedy,2013) Bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpolimas Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Sosialisasi, Diskusi, Pembekalan Parpol, Sosialisasi UU tentang prapol, Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol, Pemantauan Keberadaan LSM, Ormas dan Yayasan, Pembinaan LSM, Ormas dan Yayasan, dan Peningkatan Kinerja Pimpinan Parpol. Yakni sama – sama terdapat Sosialisasi dan Diskusi tarkait politik.

Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan pendidikan politik, yakni Penyusunan Renstra yang membelenggu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengembangkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan politik, Keterbatasan anggaran yang tersedia, Belum memilik Silabus yang pasti serta Kualitas SDM yang perlu ditngkatkan. Kendala yang dialami oleh badan Kesatuan Bangsa dan Politik hampir sama dengan penelitian (Kesnedy, 2013) yakni, pada rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat, Alokasi anggaran yang kurang dalam menunjang terlaksananya kegiatan dengan baik serta kompetensi dari ASN pegawai Kesbangpol itu sendiri. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan tiap tahunnya berdasarkan keterangan dari Bapak Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri sama halnya dengan penelitan temuan (Anjani, 2018) Mengemukakan bahwa Kegiatan pendidikan politik merupakan kegiatan rutin tahunan.

IV. KESIMPULAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon berkaitan dengan proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik adalah sebagai fasilitator, secara umum telah melaksakan tugasnya sesuai dengan tupoksi, namun belum bisa terlaksana dengan maksimal dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan proses pendidikan politik tersebut.

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon terdapat dua faktor penghambat yaitu. hambatan teknis berkaitan dengan kuantitas dari pegawai dan kualitas dari SDM yang perlu ditingkatkan dan hambatan non teknis berkaitan dengan rensunan renstra, keterbatasan anggaran, tidak adanya silabus serta kualitas SDM masyarakat terutama dari bidang pendidikan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon telah berupaya untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut dengan melakukan berbagai langkah, antara lain yaitu dengan merumuskan renstra dengan fokus penyempurnaan pada kegiatan pendidikan politik, Mempersiapkan SDM yang lebih kompeten baik penyelenggara maupun narasumber, dan meningkatkan bantuan keuangan partai politik dengan catatan pengawasan yang ketat agar presentase yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik lebih besar atau diprioritaskan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang terbatas karena menyesuaikan dengan waktu yang diberikan.

Arah Masa Depan Penelitian. Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peranan instansi terkait untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri beserta jajarannya, Dekan Fakultas Politik Pemerintahan, Kepala Prodi Studi Politik Pemerintahan, Dosen pembimbing peneliti serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon beserta jajarannya, terkhusus Sub Bidang Politik Dalam Negeri;

VI. DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Efriza dan Indrawan, Jerry. 2018. *Komunikasi Politik*, Malang: Cita Intrans Selaras

Faturrahman. dkk. 2012. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Sinar Baru Algesindo

Kartono, Kartini. 1996. *Pendidikan Politik*, Bandung: Mandar Maju

Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).

Narwoko, Dwi, J. dan Suyanto, Bagong. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.*, Jakarta : Kencana

Ndraha, T. 2011. *Ilmu Pemerintahan Baru (Kybernologi)*, Jakarta: Rineka Cipta

Nazir, M. 2013. *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia

Rauf, R. (2017). Hakekat Organisasi Perangkat Daerah (Suatu Tinjauan Teoritis dan Yuridis). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 3(2), 345-350.

Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik- Inovatif*, Bandung: Alfabeta

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta

Tejokusumo, B. (2014). Dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. *Geo Edukasi*, 3(1).

Hidayati, U. (2019). *PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN OLEH KESBANGPOL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DI KABUPATEN KEBUMEN* (Doctoral dissertation, UNNES).

Rahman, A., & Suharno, S. (2020). Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 282-290.

Kesnedi, A. M. (2013). Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolimas) dalam Pendidikan Politik di Kabupaten Kuantan Singingi.

MAHARANI, R. F. (2017). PERAN BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK (KESBANGPOL) ACEH DALAM MENSOSIALISASIKAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL DI PROVINSI ACEH. *ETD Unsyiah*.

Anjani, E. (2018). *PROSES PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK TAHUN 2017 OLEH SUB BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN BUDAYA POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT* (Doctoral dissertation).